

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju. Kebijakan Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2023 dituangkan dalam Renja Tahun 2023. Sebagai dokumen rencana pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

Rencana Kerja (RENJA) ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD. Pada RENJA ini digambarkan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Visi Misi Kabupaten Minahasa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa ditujukan untuk memberikan pelayanan prima secara sistematis dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) baik dari segi kuantitas maupun dari segi peningkatan kualitas pelayanan serta pemerataan pelaksanaan program Bangga Kencana yang diberikan kepada masyarakat dengan memenuhi standar yang telah ditetapkan baik pelayanan yang bersifat subsidi maupun mandiri sesuai dengan kemampuan masyarakat dan mudah dijangkau.

Pengembangan Program pelayanan Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga kencana) ditujukan untuk mempercepat proses perubahan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat yang positif terhadap program Bangga kencana, yang selanjutnya harus diikuti dengan perencanaan kegiatan serta penyiapan sarana pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengembangan program bangga kencana dimaksud, baik yang dikelola oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan program Bangga kencana ditujukan untuk memperkuat dan mengembangkan manajemen/jejaring pelayanan serta kelembagaan program disemua tingkatan wilayah. Kuatnya jejaring dan jaringan, mantapnya mekanisme operasional yang didukung sistem pencatatan dan pelaporan

secara akurat dengan sumberdaya manusia yang handal akan mempercepat perwujudan visi Misi Kabupaten Minahasa.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang relevan dalam penyusunan RENJA PD lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa masing-masing:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomr 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023;
41. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa disusun dengan maksud memberikan arah dalam pencapaian sasaran hasil pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada ke dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Renstra yang berlaku untuk periode lima tahun dijabarkan dalam Renja setiap tahunnya dengan mempertimbangkan isu-isu strategis serta kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dalam Renja juga diakomodir masukan yang diperoleh dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Ketercapaian Visi dan Misi tersebut sangat tergantung pada pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, yang juga akan berpengaruh pada pencapaian pembangunan daerah.

Penyusunan RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2023 dimaksudkan agar para aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki pedoman yang jelas tentang tahapan pembangunan bidang pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa pada Tahun Anggaran 2023. Karena itu, pada RENJA 2023 ini terangkum rencana program dan kegiatan, rencana anggaran, dan indikator pencapaian program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 ;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan:

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Minahasa memiliki Tujuan Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas juga Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memiliki sasaran strategis mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembinaan keluarga berencana, meningkatkan pemberdayaan keluarga sejahtera dan Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat. Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi, laju pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang sehingga ketahanan dan kesejahteraan keluarga meningkat/berkualitas. Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Daerah tahun 2023 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021. Evaluasi Renja tahun 2021 dan capaian Renstra atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan PD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan(LKjIP) PD. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya Sasaran pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Berikut ini adalah Hasil Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 terkait pencapaian target Renstra Perangkat Daerah :

Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d tahun 2021

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes)/Kegiatan Output)	Target Kinerja capaian program sampai tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun 2020	Tahun 2021			Target program dan kegiatan tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target sampai dengan Tahun 2022	
					Target	Realisasi	%		Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.02	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2.1	2.08	2.08	2.07	99	2.09	2.09	100%
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	26	32	30	23	100	28	28	100%
2.14.02.2.02.11	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah Dokumen penyediaan data dan Informasi Keluarga	5 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81.54%	80.34%	80.74%	79.61%	98	81.14%	81.14%	100%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15%	16,96%	16%	16.30%	98	15,75%	15,75%	100%

2.14.03.3.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	-	6	3	50	6	6	100%
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Laporan penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil Kegiatan Balai Penyuluhan KKBPK	25 Laporan	-	20 Laporan	20 Laporan	100	22 Laporan	22 Laporan	100%
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	37%	-	36,8%	24,72%	100	37%	37%	100%
2.14.03.2.02.04	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP Yang Melaksanakan Pembinaan Program KB bagi Masyarakat	1470 Kader	1467 Kader	1467 Kader	1470 Kader	100	1470 Kader	1470 Kader	100%
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32%	30,5%	31%	31,60%	100	31.50%	31.50%	100%
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang di visitasi dan di registrasi dan mendapatkan Distribusi alat dan obat kontrasepsi	68 Faskes	68 Faskes	68 Faskes	45 Faskes	66	68 Faskes	68 Faskes	100%
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan MKJP	25 Laporan	-	25 Laporan	3 Laporan	12	25 Laporan	25 Laporan	100%

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	7	-	3	3	100	5	5	100%
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK dikampung KB	25 Laporan	-	25 Laporan	25 Laporan	100	25 Laporan	25 Laporan	100%
2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	20%	50%	51%	100	80%	80%	100%
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	90%	84%	86%	87%	100	88%	88%	100%
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi dan sosialisasi Poktan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	2 Laporan	-	1 Laporan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.14.01.2.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4	4	4	4	100	4	4	100%
2.14.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disahkan	90%	75%	80%	80%	100	85%	85%	100%

2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumenb	2 Dokument	2 Dokument	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah rancangan Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPP/SPM Gaji dan TPP yang disusun	37 SPP/SPM	30 SPP/SPM	28 SPP/SPM	26 SPP/SPM	92	30 SPP/SPM	30 SPP/SPM	100%
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkhat daerah yang terfasilitasi	99%	96%	97%	44.07%	45	98%	98%	100%
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan /berita Acara Hasil Koordinasi dalam dan luar Daerah	37 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	37 Laporan	37 Laporan	100%

2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	100%	94%	96%	96%	100	98%	98%	100%
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia	505 Lembar	500 Lembar	505 Lbr	505 Lbr	100	505 Lembar	505 Lembar	100%
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL tersedia	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100	5 Orang	5 Orang	100%
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	93%	80%	85%	24.60%	28	91%	91%	100%
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100%
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	5 Unit	4 Unit	4 Unit	2 Unit	50	4 Unit	4 Unit	100%
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi	3 Unit	-	2 Unit	-	-	3 Unit	3 Unit	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Keluarga Berencana.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Kabupaten Minahasa

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,3	1,2	1	1	1,09	1,2	1	1	-
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,08	2,09	2,1	2,1	2,07	2,09	2,1	2,1	-
3	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,74%	81,14%	81,54%	81,54%	79,61%	81,14%	81,54%	81,54%	Tidak semua PUS adalah peserta KB
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16%	15,75%	15%	14,5%	16,3%	15,75%	15%	14,5%	Banyak PUS yang takut ber-KB ken masalah kesehatan ataupun efek samping ALOKON bahkan alasan agama, tradisi dan budaya, wilayah yang luas, akses jangkauan ke faskes, kurangnya KIE terhadap PUS sehubungan dengan kurangnya tenaga penyuluh lapangan di Minahasa

5	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	50%	80%	100%	100%	51%	80%	100%	100%	-
6	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
7	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30	28	26	24	23	28	26	24	-
8	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	3	5	7	9	3	5	7	9	Kekurangan tenaga PKB/PLKB untuk pendampingan pokja KKBPK
9	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	6	6	6	3	6	6	6	memaksimalkan 6 stakeholder dalam pengelolaan program KKBPK secara aktif
10	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	36,8%	37%	37,5%	37,8%	24,72%	37%	37,5%	37,8%	kurangnya tenaga penyuluh lapangan di Minahasa
11	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31%	31,5%	32%	32,5%	31,60%	31,5%	32%	32,5%	Kurangnya faskes siap melayani MKJP, PUS cenderung memilih metode kontrasepsi non MKJP, kurangnya KIE terhadap PUS sehubungan dengan kurangnya tenaga penyuluh lapangan di Minahasa

12	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	76,11%	77,61%	79,1%	80,2%	76,47%	77,61%	79,1%	80,2%	Tidak semua faskes mempunyai provider MKJP
13	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	29,21%	29,49%	32,42%	32,89%	39,02%	29,49%	32,42%	32,89%	Banyak PUS yang takut ber-KB ken masalah kesehatan ataupun efek samping ALOKON bahkan alasan agama, tradisi dan budaya
14	Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	37,03%	34,62%	31,11%	31%	40%	34,62%	31,11%	31%	-
15	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	41,59%	41,68%	45,97%	45%	3,17%	41,68%	45,97%	45%	-
16	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	86%	88%	90%	91%	87%	88%	90%	91%	-
17	Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	21	21	21	22,1 tahun	21,7 tahun	21	21	22,1 tahun	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

A. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Hasil analisis isu strategis selanjutnya dipadukandengan batasan tugas dan peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa makahambatan dan masalahyang dihadapi adalahsebagai berikut :

Tabel. 2.3.1 Hambatan dan Masalah

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (Kewenangan SKPD)	EKSTERNAL (Diluar Kewenangan SKPD)	
Jumlah Balai Penyuluhan KB Kecamatan	80%	Persentase Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang beroperasi aktif			- Belum semua kecamatan memiliki Balai Penyuluhan KB
Perbandingan jumlah petugas Lapangan KB (PLKB) dengan luas wilayah pelayanan	12 PLKB	Jumlah Peserta KB Aktif		Ratio Petugas PLKB dan PKB	- Luas Wilayah pelayanan yang tidak sesuai dengan jumlah petugas PLKB dan PKB di Lapangan 1 petugas lapangan melayani 27 desa (jumlah PLKB aktif 10 orang dari 270 desa)

<p>Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan</p>			<p>Kurangnya komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan</p>		<p>(1) Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap Bangga Kencana terutama yang terkait kebijakan, perencanaan program dan penganggaran; (2) Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program Bangga Kencana baik antar Kecamatan, Kelurahan/desa (3) Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan; (4) Peran Tenaga lapangan KB/PLKB dalam konseling KB belum optimal.</p>
<p>Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan</p>					<p>(1) Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun masih tinggi; (2) Masih banyaknya perkawinan usia muda; (3) Tingginya perilaku seks pra nikah disebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi; (4) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah.</p>

<p>Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan</p>					<p>(1) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (2) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, kelompok kegiatan (Poktan), yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya berKB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); (3) Terbatasnya materi program Bangga Kencana dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.</p>
--	--	--	--	--	---

Pelaksanaan Tugas-tugas Kantor					<p>Dengan banyaknya tugas-tugas yang dilaksanakan pada Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa diperlukan Pegawai-pegawai yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugasnya dan berpengalaman untuk mencapai kelancaran Tugas Dinas</p> <p>b. Penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kompetensi atau dengan bidang tugasnya. Dan seluruh pegawai diharapkan memahami Tupoksi sehingga dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari.</p>
--------------------------------	--	--	--	--	---

B. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

Tabel. 2.3.2 Tantangan dan Peluang

PERMASALAHAN	TANTANGAN	PELUANG
Luas Wilayah Garapan yang tidak Sesuai dengan Jumlah Petugas PLKB di Lapangan (1 : 27)	Keterbatasan / Kurangnya tenaga Penyuluh KB dilapangan sehingga perlu penambahan pegawai sebagai Tenaga Lapangan	-Menanggulangi kekurangan PLKB dengan PLKB non PNS -Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, serta optimalisasi fungsi PPKBD dan Sub-PPKBD (Kader) sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Bangga Kencana di lini lapangan.
Banyaknya kelompok kegiatan bagi peningkatan ketahanan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang	Kurangnya Melakukan pelatihan dan pendampingan kelompok TriBina dan UPPKS	- Adanya upaya kemitraan dengan stakeholder terkait -Memanfaatkan Dana DAK Non Fisik (BOKB)

<p>memerlukan pendampingan kelompok dan pelaitan</p>		
<p>Tupoksi Pegawai</p>	<p>Dalam Penyelenggaraan tugas-tugas dilihat dari unsur penunjang yang ada yaitu unsur Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. minahasa kalau dilihat dari segi Profesional dan Proporsional dirasakan masih kurang didalam melaksanakan tugasnya dikarenakan keterbatasan pegawai dan kurangnya pemahaman pegawai tentang TUPOKSI.</p>	<p>Penambahan Pegawai</p>

Dari tabel hambatan dan masalah serta tantangan dan peluang dapat ditentukan isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas dalam meningkatkan Pembangunan Keluarga pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di tahun 2023 antara lain melalui:

- 1) Ketersediaan instrumen regulasi yang mendukung penguatan program dan kegiatan Bidang Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan dan KB ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- 2) Ketersediaan rancang bangun program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, KB (Bangga Kencana) yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten);
- 3) Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan KB di Tingkat Kabupaten;
- 4) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota, serta optimalisasi fungsi PPKBD dan Sub-PPKBD (Kader) sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Bangga Kencana di lini lapangan;
- 5) Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi melalui kegiatan prioritas :
 - a. Pelayanan KB;
 - b. Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana;
 - c. Pembinaan Remaja;
 - d. Pembangunan Keluarga
 - e. Regulasi, Kelembagaan serta Data dan Informasi.
 - f. Adanya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memadai baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan (PKB/PLKB)
 - g. Jejaring kemitraan lintas sektoral

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Hasil analisis kebutuhan terdapat perubahan terhadap rancangan awal RKPD. Rancangan awal tidak memenuhi Bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) dan pengadaan sarana dan prasarana program KB bagi PKB/PLKB yang berperan penting dalam sasaran strategis meningkatkan tingkat kesertaan ber-KB, sehingga atas hal tersebut dalam hasil analisis bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) dan pengadaan sarana dan prasarana program KB bagi PKB/PLKB di tambahkan sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Juta Rp	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Juta Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,1	205,830,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,1	205,830,000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 dokumen	50,000,000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 dokumen	50,000,000	
2.14.02.2.01.02	<i>Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)</i>	Minahasa	<i>Jumlah dokumen RAD yang dimanfaatkan</i>	-	50,000,000	<i>Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)</i>	Minahasa	<i>Jumlah dokumen RAD yang dimanfaatkan</i>	-	50,000,000	
2.14.02.2.01.03	<i>Dukungan Pelaksanaan survei/Pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan</i>	Minahasa	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan survei/Pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan</i>	1 Laporan	-	<i>Dukungan Pelaksanaan survei/Pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan</i>	Minahasa	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan survei/Pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan</i>	1 Laporan	-	
2.14.02.2.01.04	<i>Pelaksanaan survei/indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan</i>	Minahasa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan survei/indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan</i>	1 Laporan	-	<i>Pelaksanaan survei/indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan</i>	Minahasa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan survei/indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan</i>	1 Laporan	-	

2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Minahasa	Jumlah Laporan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Laporan	-	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Minahasa	Jumlah Laporan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Laporan	-
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Pramuka	Jumlah Laporan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 Laporan	-	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Pramuka	Jumlah Laporan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 Laporan	-
2.14.02.2.01.07	Penyediaan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Minahasa	Jumlah materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal yang disediakan	2 Paket	-	Penyediaan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Minahasa	Jumlah materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal yang disediakan	2 Paket	-
2.14.02.2.01.08	Penyediaan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Minahasa	Jumlah materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal yang disediakan	2 Paket	-	Penyediaan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Minahasa	Jumlah materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal yang disediakan	2 Paket	-
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Minahasa	Jumlah laporan advokasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal dan informal	5 Laporan	-	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Minahasa	Jumlah laporan advokasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal dan informal	5 Laporan	-
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Minahasa	Jumlah laporan Implementasi Pendidikan kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	2 Laporan	-	Implementasi Pendidikan kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Minahasa	Jumlah laporan Implementasi Pendidikan kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	2 Laporan	-

2.14.02.2.01.1 1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Minahasa	Jumlah Laporan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	5 Laporan	-	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Minahasa	Jumlah Laporan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	5 Laporan	-	
2.14.02.2.01.1 2	Advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Minahasa	Jumlah laporan Advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan	1 Laporan	-	Advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Minahasa	Jumlah laporan Advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan	1 Laporan	-	
2.14.02.2.01.1 3	sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Minahasa	Jumlah laporan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan	1 Laporan	-	sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Minahasa	Jumlah laporan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan	1 Laporan	-	
2.14.02.2.01.1 4	pelaksanaan sarasehan hasil pemuktahiran data keluarga	Minahasa	Jumlah laporan pelaksanaan sarasehan hasil pemuktahiran data keluarga	1 Laporan	-	pelaksanaan sarasehan hasil pemuktahiran data keluarga	Minahasa	Jumlah laporan pelaksanaan sarasehan hasil pemuktahiran data keluarga	1 Laporan	-	
2.14.02.2.01.1 5	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	25 kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	25 Laporan	-	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	25 kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	25 Laporan	-	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	26 org	155,830,000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	26 org	155,830,000	

2.14.02.2.02.01	perumusan parameter kependudukan	Minahasa	Jumlah laporan perumusan parameter kependudukan	1 Laporan	-	perumusan parameter kependudukan	Minahasa	Jumlah laporan perumusan parameter kependudukan	1 Laporan	-	
2.14.02.2.02.02	penyediaan dan pengolahan data kependudukan	Minahasa	Jumlah laporan penyediaan dan pengolahan data kependudukan	1 Laporan	-	penyediaan dan pengolahan data kependudukan	Minahasa	Jumlah laporan penyediaan dan pengolahan data kependudukan	1 Laporan	-	
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Minahasa	Jumlah dokumen profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	-	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Minahasa	Jumlah dokumen profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	-	
2.14.02.2.02.04	pemetaan kependudukan	Minahasa	Jumlah laporan pemetaan kependudukan	1 Laporan	-	pemetaan kependudukan	Minahasa	Jumlah laporan pemetaan kependudukan	1 Laporan	-	
2.14.02.2.02.05	penyusunan kajian dampak kependudukan	Minahasa	Jumlah dokumen kajian kependudukan	1 Laporan	-	penyusunan kajian dampak kependudukan	Minahasa	Jumlah dokumen kajian kependudukan	1 Laporan	-	
2.14.02.2.02.06	pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	Minahasa	Jumlah laporan pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	1 Laporan	-	pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	Minahasa	Jumlah laporan pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	1 Laporan	-	
2.14.02.2.02.07	pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (Early Warning System/peringatan dini)	Minahasa	Jumlah dokumen pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (Early Warning System/peringatan dini)	1 Dokumen	-	pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (Early Warning System/peringatan dini)	Minahasa	Jumlah dokumen pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (Early Warning System/peringatan dini)	1 Dokumen	-	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Minahasa	Jumlah laporan pembentukan Rumah Data Kependudukan	10 Laporan	-	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Minahasa	Jumlah laporan pembentukan Rumah Data Kependudukan	10 Laporan	-	
2.14.02.2.02.09	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Minahasa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	1 Laporan	-	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Minahasa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	1 Laporan	-	

2.14.02.2.02.10	pemanfaatan data hasil pemuktahiran data keluarga	Minahasa	Jumlah laporan pemanfaatan data hasil pemuktahiran data keluarga	1 Laporan	-	pemanfaatan data hasil pemuktahiran data keluarga	Minahasa	Jumlah laporan pemanfaatan data hasil pemuktahiran data keluarga	1 Laporan	-	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan data dan informasi keluarga	Minahasa	Jumlah Dokumen penyediaan data dan Informasi Keluarga	5 Dokumen	-	Penyediaan data dan informasi keluarga	Minahasa	Jumlah Dokumen penyediaan data dan Informasi Keluarga	5 Dokumen	-	
2.14.02.2.02.12	pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Minahasa	jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1 Laporan	-	pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Minahasa	jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1 Laporan	-	
2.14.02.2.02.13	pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Minahasa	Jumlah laporan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Laporan	155,830,000	pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Minahasa	Jumlah laporan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Laporan	155,830,000	
2.14.02.2.02.14	pembinaan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Minahasa	Jumlah laporan pembinaan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	1 Laporan	-	pembinaan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Minahasa	Jumlah laporan pembinaan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	1 Laporan	-	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81,54%	5,305,394,178	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81,54%	5,305,394,178	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15%				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15%		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	1,412,144,305	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	1,412,144,305	
2.14.03.2.01.01	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Minahasa	Jumlah laporan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	1 Laporan	-	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Minahasa	Jumlah laporan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	1 Laporan	-	

2.14.03.2.01.0 2	<i>komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal</i>	Minahasa	<i>Jumlah laporan KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal</i>	1 Laporan	-	<i>komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal</i>	Minahasa	<i>Jumlah laporan KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal</i>	1 Laporan	-	
2.14.03.2.01.0 3	<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	Minahasa	<i>Jumlah Laporan penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	1 Laporan	-	<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	Minahasa	<i>Jumlah Laporan penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	1 Laporan	-	
2.14.03.2.01.0 4	<i>promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang</i>	Minahasa	<i>Jumlah Laporan promosi KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang</i>	1 Laporan	100,009,404	<i>promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang</i>	Minahasa	<i>Jumlah Laporan promosi KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang</i>	1 Laporan	100,009,404	
2.14.03.2.01.0 5	<i>penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK</i>	Minahasa	<i>Jumlah Laporan penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK</i>	1 Laporan	-	<i>penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK</i>	Minahasa	<i>Jumlah Laporan penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK</i>	1 Laporan	-	
2.14.03.2.01.0 6	<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	25 kecamatan	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	25 Laporan	502,135,368	<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	25 kecamatan	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	25 Laporan	502,135,368	
2.14.03.2.01.0 7	<i>Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	25 Kecamatan	<i>Jumlah laporan hasil Kegiatan Balai Penyuluhan KKBPK</i>	25 Laporan	809,999,533	<i>Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	25 Kecamatan	<i>Jumlah laporan hasil Kegiatan Balai Penyuluhan KKBPK</i>	25 Laporan	809,999,533	
2.14.03.2.01.0 8	<i>Pengendalian Program KKBPK</i>	Minahasa	<i>Jumlah Laporan pengendalian program KKBPK</i>	12 Laporan	-	<i>Pengendalian Program KKBPK</i>	Minahasa	<i>Jumlah Laporan pengendalian program KKBPK</i>	12 Laporan	-	
2.14.03.2.02	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>		<i>Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)</i>	37,5%	1,821,000,000	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>		<i>Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)</i>	37,5%	1,821,000,000	

2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini Lapangan oleh PKB/PLKB	25 kecamatan	Jumlah Laporan Pembinaan IMP dan Program KKBPK oleh PKB/PLKB	12 Laporan	-	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini Lapangan oleh PKB/PLKB	25 kecamatan	Jumlah Laporan Pembinaan IMP dan Program KKBPK oleh PKB/PLKB	12 Laporan	-
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	25 kecamatan	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB	25 Paket	525,000,000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	25 kecamatan	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB	25 Paket	525,000,000
2.14.03.2.02.03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Minahasa	Jumlah Laporan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan untuk petugas KB/penyuluh lapangan KB	25 Laporan	-	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Minahasa	Jumlah Laporan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan untuk petugas KB/penyuluh lapangan KB	25 Laporan	-
2.14.03.2.02.04	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	25 kecamatan	Jumlah kader IMP Yang Melaksanakan Pembinaan Program KB bagi Masyarakat	1470 Kader	1,296,000,000	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	25 kecamatan	Jumlah kader IMP Yang Melaksanakan Pembinaan Program KB bagi Masyarakat	1470 Kader	1,296,000,000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32%	412,788,000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32%	412,788,000
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Minahasa	Jumlah Faskes yang di visitasi dan di registrasi dan mendapatkan Distribusi alat dan obat kontrasepsi	68 Faskes	30,150,000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Minahasa	Jumlah Faskes yang di visitasi dan di registrasi dan mendapatkan Distribusi alat dan obat kontrasepsi	68 Faskes	30,150,000
2.14.03.2.03.02	Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	Minahasa	Jumlah laporan Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alkon pelayanan KB	1 Laporan	-	Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	Minahasa	Jumlah laporan Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alkon pelayanan KB	1 Laporan	-

2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Minahasa	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan MKJP	25 Laporan	359,238,000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Minahasa	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan MKJP	25 Laporan	359,238,000
2.14.03.2.03.04	Penyediaan dukungan Anyoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Minahasa	Jumlah laporan dukungan anyoman komplikasi berat dan kegagalan MKJP	1 Laporan	-	Penyediaan dukungan Anyoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Minahasa	Jumlah laporan dukungan anyoman komplikasi berat dan kegagalan MKJP	1 Laporan	-
2.14.03.2.03.05	penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang KB	Minahasa	Jumlah laporan rencana kebutuhan ALOKON dan sarana penunjang pelKB	1 Laporan	-	penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang KB	Minahasa	Jumlah laporan rencana kebutuhan ALOKON dan sarana penunjang pelKB	1 Laporan	-
2.14.03.2.03.06	Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB	Minahasa	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	2 Unit	-	Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB	Minahasa	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	2 Unit	-
2.14.03.2.03.07	pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	Minahasa	Jumlah laporan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	12 Laporan	-	pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	Minahasa	Jumlah laporan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	12 Laporan	-
2.14.03.2.03.08	pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Minahasa	Jumlah laporan pembinaan pel.KB dan kespro di faskes dan jaringan dan jejaringnya	60 Faskes	23,400,000	pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Minahasa	Jumlah laporan pembinaan pel.KB dan kespro di faskes dan jaringan dan jejaringnya	60 Faskes	23,400,000
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan kelompok Kegiatan	Minahasa	Jumlah Laporan Kegiatan Promosi dan Konseling kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Faskes dan Poktan	2 Laporan	-	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan kelompok Kegiatan	Minahasa	Jumlah Laporan Kegiatan Promosi dan Konseling kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Faskes dan Poktan	2 Laporan	-
2.14.03.2.03.11	Dukungan Oprasional pelayanan KB bergerak	Minahasa	Jumlah laporan dukungan oprasional pel.KB bergerak	1 Laporan	-	Dukungan Oprasional pelayanan KB bergerak	Minahasa	Jumlah laporan dukungan oprasional pel.KB bergerak	1 Laporan	-
2.14.03.2.03.12	Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	Minahasa	Jumlah laporan promosi dan konseling KB pasca persalinan dan keguguran	1 Laporan	-	Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	Minahasa	Jumlah laporan promosi dan konseling KB pasca persalinan dan keguguran	1 Laporan	-
2.14.03.2.03.13	Peningkatan kesertaan KB Pria	Minahasa	Jumlah Laporan peningkatan kesertaan KB pria	1 Laporan	-	Peningkatan kesertaan KB Pria	Minahasa	Jumlah Laporan peningkatan kesertaan KB pria	1 Laporan	-

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	7	776,249,873	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	7	776,249,873	
2.14.03.2.04.02	<i>Integrasi pembangunan Lintas Sektor di kampung KB</i>	<i>Minahasa</i>	<i>Jumlah laporan Integrasi pembangunan Lintas Sektor di kampung KB</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>-</i>	<i>Integrasi pembangunan Lintas Sektor di kampung KB</i>	<i>Minahasa</i>	<i>Jumlah laporan Integrasi pembangunan Lintas Sektor di kampung KB</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>-</i>	
2.14.03.2.04.03	<i>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</i>	<i>25 kecamatan</i>	<i>Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB</i>	<i>25 Laporan</i>	<i>776,249,873</i>	<i>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</i>	<i>25 kecamatan</i>	<i>Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB</i>	<i>25 Laporan</i>	<i>776,249,873</i>	
2.14.03.2.04.04	<i>Pembinaan terpadu Kampung KB</i>	<i>45 kampung KB</i>	<i>Jumlah laporan pembinaan kampung KB</i>	<i>45 Laporan</i>	<i>-</i>	<i>Pembinaan terpadu Kampung KB</i>	<i>45 kampung KB</i>	<i>Jumlah laporan pembinaan kampung KB</i>	<i>45 Laporan</i>	<i>-</i>	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	1,854,680,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	1,854,680,000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	90%	1,854,680,000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	90%	1,854,680,000	
2.14.04.2.01.01	<i>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) , Pusat informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</i>	<i>-</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil kegiatan pembentukan Sarana Poktan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) , Pusat informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</i>	<i>-</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil kegiatan pembentukan Sarana Poktan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

2.14.04.2.01.0 2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 Kecamatan	Jumlah Sarana Poktan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga	25 Kit	336,000,000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 Kecamatan	Jumlah Sarana Poktan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga	25 Kit	336,000,000	
2.14.04.2.01.0 3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah laporan hasil kegiatan orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	-	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah laporan hasil kegiatan orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	-	
2.14.04.2.01.0 4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilatih	1 Laporan	-	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilatih	1 Laporan	-	
2.14.04.2.01.0 5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	25 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil kegiatan penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	1,518,680,000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	25 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil kegiatan penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	1,518,680,000	

2.14.04.2.01.06	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	25 Kecamatan	Jumlah laporan hasil kegiatan penyediaan biaya operasional bagi poktan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	-	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	25 Kecamatan	Jumlah laporan hasil kegiatan penyediaan biaya operasional bagi poktan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	-
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi dan sosialisasi Poktan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	1 laporan	-	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi dan sosialisasi Poktan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	1 laporan	-
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, Berkelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Minahasa	Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi dan sosialisasi Poktan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	1 laporan	-	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, Berkelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Minahasa	Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi dan sosialisasi Poktan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	1 laporan	-
2.14.04.2.01.09	Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	Minahasa	Jumlah Laporan hasil kegiatan penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	1 Laporan	-	Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	Minahasa	Jumlah Laporan hasil kegiatan penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	1 Laporan	-
2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Minahasa	Jumlah Laporan Hasil kegiatan penyediaan dan pengembangan materi IPK	1 Laporan	-	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Minahasa	Jumlah Laporan Hasil kegiatan penyediaan dan pengembangan materi IPK	1 Laporan	-

2.14.04.2.01.1 1	Advokasi dan Promosi IPK	Minahasa	Jumlah laporan hasil kegiatan advokasi dan promosi IPK	1 Laporan	-	Advokasi dan Promosi IPK	Minahasa	Jumlah laporan hasil kegiatan advokasi dan promosi IPK	1 Laporan	-	
2.14.04.2.01.1 2	Sosialisasi IPK	Minahasa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi IPK	1 Laporan	-	Sosialisasi IPK	Minahasa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi IPK	1 Laporan	-	
2.14.04.2.01.1 3	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi pencapaian IPK	Minahasa	Jumlah Laporan Hasil kegiatan pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK	1 Laporan	-	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi pencapaian IPK	Minahasa	Jumlah Laporan Hasil kegiatan pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK	1 Laporan	-	
2.14.01.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	21	-	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	21	-	
2.14.01.2.02.0 1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 9BKB,BKR,BKL,PPPKS,PI K-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah laporan hasil kegiatan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	-	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 9BKB,BKR,BKL,PPPKS,PI K-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah laporan hasil kegiatan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	-	

2.14.01.2.02.0 2	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Oprasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah laporan hasil kegiatan pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi dalam penggerakan oprasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	-	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Oprasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah laporan hasil kegiatan pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi dalam penggerakan oprasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	-	
2.14.01.2.02.0 3	Pelaksanaan peningkatan kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	-	Pelaksanaan peningkatan kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	-	
2.14.01.2.02.0 4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Minahasa	jumlah laporan hasil kegiatan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	-	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Minahasa	jumlah laporan hasil kegiatan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Laporan	-	
2.14.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4	2,916,513,839	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4	2,916,513,839	
2.14.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disahkan	90%	3,090,000	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disahkan	90%	3,090,000	
2.14.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dokumen	1,545,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dokumen	1,545,000	
2.14.01.2.01.0 2	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	
2.14.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Rancangan Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Rancangan Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	-	

2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah rancangan Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah rancangan Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	-
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan kinerja instansi pemerintah yang tersusun	1 Dokumen	1,545,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan kinerja instansi pemerintah yang tersusun	1 Dokumen	1,545,000
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	2,568,646,612	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	2,568,646,612
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah SPP/SPM Gaji dan TPP yang disusun	37 SPP/SPM	2,567,101,612	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah SPP/SPM Gaji dan TPP yang disusun	37 SPP/SPM	2,567,101,612
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah SPP/SPM yang di Tatausahakan dan diuji/diverifikasi	12 SPP/SPM	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah SPP/SPM yang di Tatausahakan dan diuji/diverifikasi	12 SPP/SPM	-
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1,545,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1,545,000
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD		Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulan/semester an SKPD	2 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD		Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulan/semester an SKPD	2 Laporan	-
2.14.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	-	Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	-
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaporan BMD yang ditetapkan/disahkan	93%	600,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaporan BMD yang ditetapkan/disahkan	93%	600,000
2.14.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD		Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Laporan	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD		Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Laporan	-

2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan/Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	600,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan/Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	600,000
2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	-
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	98%	17,510,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	98%	17,510,000
2.14.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-
2.14.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya		Jumlah PHD yang disediakan	35 stel	17,510,000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya		Jumlah PHD yang disediakan	35 stel	17,510,000
2.14.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah laporan pelaksanaan sistem Informasi kepegawaian	4 Laporan	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah laporan pelaksanaan sistem Informasi kepegawaian	4 Laporan	-
2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 ASN	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 ASN	-
2.14.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Sosialisasi perundang-undangan yang tersusun	2 Laporan	-	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Sosialisasi perundang-undangan yang tersusun	2 Laporan	-
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 ASN	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 ASN	-
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	99%	79,590,727	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	99%	79,590,727
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3,987,130	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3,987,130
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	17,312,807	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	17,312,807

2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan RT yang disediakan (sesuai jenis yang diadakan) mis ember, sapu, gayung dll	22 Buah	4,613,370	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan RT yang disediakan (sesuai jenis yang diadakan) mis ember, sapu, gayung dll	22 Buah	4,613,370
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	5,988,420	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	5,988,420
2.14.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Koran Tersedia selama 12 bulan	240 koran	-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Koran Tersedia selama 12 bulan	240 koran	-
2.14.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material		Jumlah Laporan penyediaan bahan dan material	Laporan	-	Penyediaan bahan/material		Jumlah Laporan penyediaan bahan dan material	Laporan	-
2.14.01.2.06.08	fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang Terfasilitasi	50 Tamu	1,545,000	fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang Terfasilitasi	50 Tamu	1,545,000
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan /berita Acara Hasil Koordinasi dalam dan luar Daerah	37 Laporan	46,144,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan /berita Acara Hasil Koordinasi dalam dan luar Daerah	37 Laporan	46,144,000
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai RKBMD SKPD	93%	66,280,500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai RKBMD SKPD	93%	66,280,500
2.14.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di adakan	-	-	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di adakan	-	-
2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	525,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	525,000,000
2.14.01.2.07.05	Pengandaan Mebel		Jumlah mabel yang disediakan (sesuai jenis yang diadakan)	29 Buah	26,625,500	Pengandaan Mebel		Jumlah mabel yang disediakan (sesuai jenis yang diadakan)	29 Buah	26,625,500
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (sesuai jenis yang diadakan)	4 Buah	39,655,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (sesuai jenis yang diadakan)	4 Buah	39,655,000
2.14.01.2.07.07	Pengadaan Aset tetap lainnya		Jumlah Laporan pengadaan aset tetap lainnya	1 Laporan	-	Pengadaan Aset tetap lainnya		Jumlah Laporan pengadaan aset tetap lainnya	1 Laporan	-
2.14.01.2.07.08	Pengadaan Aset tak Berwujud		Jumlah Laporan Pengadaan aset tak terwujud	1 Laporan	-	Pengadaan Aset tak Berwujud		Jumlah Laporan Pengadaan aset tak terwujud	1 Laporan	-

2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Terbangun	2 Gedung	-	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Terbangun	2 Gedung	-
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya (sesuai jenis yang diadakan)	5 Unit	-	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya (sesuai jenis yang diadakan)	5 Unit	-
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	100%	155,320,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	100%	155,320,000
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai tersedia	644 lbr	6,440,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai tersedia	644 lbr	6,440,000
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	15,680,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	15,680,000
2.14.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan	-	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan	-
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah THL tersedia	5 Orang	133,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah THL tersedia	5 Orang	133,200,000
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	93%	25,476,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	93%	25,476,000
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	1 Unit	7,966,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	1 Unit	7,966,000
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	5 Unit	17,510,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	5 Unit	17,510,000
2.14.01.2.09.05	pemeliharaan mebel		Jumlah laporan pemeliharaan mebel yang tersusun	1 Laporan	-	pemeliharaan mebel		Jumlah laporan pemeliharaan mebel yang tersusun	1 Laporan	-

2.14.01.2.09.06	<i>pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>		<i>Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	1 Laporan	-	<i>pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>		<i>Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	1 Laporan	-	
2.14.01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi</i>	2 unit	117,250,000	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi</i>	2 unit	117,250,000	
2.14.01.2.09.10	<i>pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>		<i>Jumlah Laporan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	1 Laporan	-	<i>pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>		<i>Jumlah Laporan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	1 Laporan	-	
2.14.01.2.09.11	<i>pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>		<i>Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	1 Laporan	-	<i>pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>		<i>Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	1 Laporan	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari hasil Musrenbang maupun usulan lainnya dari masyarakat. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana lainnya sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel. 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/	Catatan
				Volume	
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Prioritas pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa tahun 2023 yang ditetapkan selain untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan Kabupaten Minahasa juga untuk mendukung sasaran pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan melalui RKP BKKBN Pusat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi Program Keluarga Berencana sebagai Program Nasional sehingga kebijakan nasional yang diarahkan dan berkaitan dengan tugas pokok dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Tugas dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan melakukan kemitraan dengan semua elemen baik TNI, POLRI, PKK dan Masyarakat termasuk dengan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pengembangan jaringan pelayanan ditujukan untuk mempercepat proses perubahan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat yang positif terhadap program Bangga Kencana, yang selanjutnya harus diikuti dengan penyiapan sarana pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Penyiapan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana ditujukan untuk memberikan pelayanan prima di bidang Kesejahteraan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik dari segi kuantitas maupun dari segi peningkatan kualitas pelayanan serta pemerataan pelaksanaan program Bangga Kencana. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus memenuhi standar yang telah ditetapkan baik pelayanan bersifat subsidi maupun mandiri dengan sesuai kemampuan masyarakat dan mudah dijangkau. Mantapnya mekanisme operasional yang didukung sistem pencatatan dan pelaporan secara akurat dengan Sumber Daya Manusia yang handal akan mempercepat perwujudan visi dan Misi Kabupaten Minahasa.

Sasaran Strategis Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh

Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2022 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2022 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2022 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2022 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pemetaan atas kesesuaian Program dan Kegiatan Prioritas (termasuk Sasaran Strategis, Outcome, dan Output) seluruh K/L terhadap Janji Presiden yang harus diimplementasikan selama periode 5 (lima) tahun kedepan, serta memberikan arahan agar berbagai Program/Kegiatan Prioritas yang disusun oleh K/L sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Terkait dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), secara umum BKKBN berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Janji Presiden dalam hal:

1. Pembangunan Keluarga

BKKBN tetap dalam lingkup Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, mendukung sepenuhnya upaya pencapaian Janji Presiden terkait “Meningkatkan keterlibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga” dan “Revolusi Mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga”. Terutama dalam pengembangan kegiatan prioritas dalam penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini, serta pengembangan kegiatan terkait Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat.

2. Kependudukan

Pembangunan Kependudukan terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk “Memantapkan Reformasi Sistem Kependudukan Nasional”. Dalam hal ini BKKBN mendukung sepenuhnya Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 dalam Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, terutama dalam upaya “Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan”.

3. Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk “Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). BKKBN Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 mendukung Arah Kebijakan dan Strategi pada Rancangan RPJMN 2020-2024 dalam upaya “Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023, maka visi misi Kabupaten Minahasa adalah :

Visi : **“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera”**

Misi :

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan; dan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Berpedoman pada Misi 1(Satu) dan Misi 4(Empat) maka disusun tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tujuan 1 (Satu) : Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

Sasaran :

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk
2. Meningkatkan pembinaan keluarga berencana
3. Meningkatkan Pemberdayaan keluarga sejahtera

Tujuan 2(Dua) : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah

Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 – 2023 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sasaran khusus yang ingin dicapai sebagai berikut: Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas. Terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan ,profesional dan akuntabel.

1.2 Rumusan program dan kegiatan tahun 2023

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud maka dirumuskan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024, dengan rincian sebagaimana table 3.3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9.658.287.761		11.599.187.741					
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.660.122.761		5.180.630.161					
2	14	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					580.000		2.472.237.500					
2	14	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	1.622.250
2	14	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	0
2	14	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	0

2	14	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Laporan	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	1.622.250
2	14	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Laporan	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	2.468.993.000
2	14	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.469.225.000				2.470.615.250	
2	14	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	37 Orang/bul	an100 %	2.468.993.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	2.468.993.000
2	14	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Laporan	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	1.622.250
2	14	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	0
2	14	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							232.000				648.900	
2	14	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka 4 Angka	1 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka 4 Angka	0

2	14	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka 4 Angka	1 Laporan	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka 4 Angka	648.900
2	14	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										10.616.836			16.377.761
2	14	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka 4 Angka	12 Paket	100 %	10.616.836	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka 4 Angka	16.377.761
2	14	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										6.318.675			41.637.750
2	14	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	4 Unit	100 %	6.318.675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	41.637.750
2	14	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										155.380.000			155.320.000
2	14	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Laporan	100 %	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	6.440.000
2	14	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Laporan	100 %	15.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	15.680.000
2	14	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Laporan	100 %	133.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	133.200.000
2	14	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										17.770.250			23.793.000
2	14	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Unit	100 %	8.770.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	5.407.500
2	14	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	4 Unit	100 %	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Angka	18.385.500
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										156.178.000			0
2	14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										116.000			0

2	14	02	2,01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.1 Angka	1 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2.1 Angka	0
2	14	02	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								156.062.000				0	
2	14	02	2,02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.1 Angka	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Total Fertility Rate (TFR)	2.1 Angka	0
2	14	02	2,02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.1 Angka	1 Laporan	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Total Fertility Rate (TFR)	2.1 Angka	0
2	14	02	2,02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.1 Angka	1 Dokumen	100 %	155.830.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB		Total Fertility Rate (TFR)	2.1 Angka	0
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								5.323.307.000				6.418.557.580	
2	14	03	2,01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								1.346.365.127				1.478.012.508	
2	14	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	1 Dokumen	100 %	100.009.404	DAK Non Fisik- BOKB- KB		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	15 % 81.54 %	0
2	14	03	2,01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	25 Laporan	100 %	436.356.190	DAK Non Fisik- BOKB- KB		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	15 % 81.54 %	0

2	14	03	2,01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	0 Laporan 25 Laporan	100 %	809.999.533	DAK Non Fisik- BOKB- KB		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	15 % 81.54 %	1.478.012.508
2	14	03	2,02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								1.737.904.000				1.401.624.000	
2	14	03	2,02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	25 Unit	100 %	441.904.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	15 % 81.54 %	0
2	14	03	2,02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	1470 Orang	100 %	1.296.000.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	15 % 81.54 %	1.401.624.000
2	14	03	2,03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								1.462.788.000				2.103.770.572	
2	14	03	2,03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	12 Laporan	100 %	30.150.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	15 % 81.54 %	175.281.950
2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	1000 Orang	100 %	359.238.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	15 % 81.54 %	782.269.499

2	14	03	2,03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	2 Unit	100 %	1.050.000.000	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	15 % 81.54 %	1.146.219.123
2	14	03	2,03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	1 Laporan	100 %	23.400.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	15 % 81.54 %	0
2	14	03	2,04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB							776.249.873				1.435.150.500	
2	14	03	2,04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	45 Kampung	100 %	776.249.873	DAK Non Fisik- BOKB- KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	15 % 81.54 %	1.435.150.500
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							1.518.680.000				0	
2	14	04	2,01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							1.518.680.000				0	
2	14	04	2,01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	810 Orang	100 %	1.518.680.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100 %	0
TOTAL													9.658.287.761				11.599.187.741

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Minahasa merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa 2018–2023 dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam renja 2023 dan kebijakan umum APBD. Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Pelaksanaan Kegiatan renja harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah dengan kabupaten/kota maupun perangkat daerah dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah di programkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luar dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan factor terpenting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program maupun kegiatan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2023 berisi program dan kegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah didukung oleh pendanaan(pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrument pelaksanaan dari program perangkat daerah tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 disajikan pada table 3.3 diatas. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RKPD tahun 2023 yang sudah ditetapkan.

Tabel 4.1
Rencana kerja dan pendanaan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							9.658.287.761		
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.660.122.761		
2	14	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							580.000		
2	14	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Laporan	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Laporan	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	14	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.469.225.000		
2	14	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	37 Orang/bulan	100%	2.468.993.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Laporan	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								232.000		
2	14	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka 4 Angka	1 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka 4 Angka	1 Laporan	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	14	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								10.616.836	
2	14	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka 4 Angka	12 Paket	100 %	10.616.836	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6.318.675	
2	14	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	4 Unit	100 %	6.318.675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								155.380.000	
2	14	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Laporan	100 %	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Laporan	100 %	15.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Laporan	100 %	133.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								17.770.250	
2	14	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 Unit	100 %	8.770.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	14	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	4 Unit	100 %	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							156.178.000		
2	14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							116.000		
2	14	02	2,01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.1 Angka	1 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	02	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							156.062.000		
2	14	02	2,02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.1 Angka	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	02	2,02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.1 Angka	1 Laporan	100 %	116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	02	2,02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.1 Angka	1 Dokumen	100 %	155.830.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB

2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							5.323.307.000		
2	14	03	2,01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							1.346.365.127		
2	14	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	1 Dokumen	100 %	100.009.404	DAK Non Fisik- BOKB- KB
2	14	03	2,01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	25 Laporan	100 %	436.356.190	DAK Non Fisik- BOKB- KB
2	14	03	2,01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	0 Laporan 25 Laporan	100 %	809.999.533	DAK Non Fisik- BOKB- KB

2	14	03	2,02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							1.737.904.000			
2	14	03	2,02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	25 Unit	100 %	441.904.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB
2	14	03	2,02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	1470 Orang	100 %	1.296.000.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB
2	14	03	2,03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							1.462.788.000			
2	14	03	2,03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	12 Laporan	100 %	30.150.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB
2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	1000 Orang	100 %	359.238.000	DAK Non Fisik- BOKB- KB

2	14	03	2,03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	2 Unit	100 %	1.050.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
2	14	03	2,03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	1 Laporan	100 %	23.400.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB
2	14	03	2,04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB							776.249.873		
2	14	03	2,04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 81.54 %	45 Kampung	100 %	776.249.873	DAK Non Fisik-BOKB- KB
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							1.518.680.000		
2	14	04	2,01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							1.518.680.000		
2	14	04	2,01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	810 Orang	100 %	1.518.680.000	DAK Non Fisik-BOKB- KB
TOTAL													9.658.287.761	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupten Minahasa Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, dan disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupten Minahasa 2018 – 2023. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan akan lebih mudah untuk dapat mengendalikan Pelaksanaan Pembangunan, Khususnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2023 merupakan Rencana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melanjutkan RENSTRA DPPKB Tahun 2018-2023 serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Rencana Kerja Tahun 2023 dimaksudkan guna mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupten Minahasa Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupten Minahasa Tahun 2023 kami susun untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya pengambilan kebijakan serta sebagai bahan acuan kami untuk program kegiatan di tahun 2023. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa diharapkan prioritas pembangunan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Minahasa dapat lebih sinergis dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan.

Semoga upaya – upaya kita dalam meningkatkan kinerja untuk ikut membangun bangsa dan negara, khususnya pemerintah Kabupaten Minahasa dapat terlaksana dengan segala baik.

Kepala Dinas



SYULTJE M. PANAMBUNAN, SE, MAP
Pembina Tk. I
NIP. 19670771 198803 2 015